



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 15 September 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026
Ketua Rapat	: Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H./Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 (dua puluh empat) Anggota Komisi II DPR RI dari 42 (empat puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri C. Menteri ATR/BPN D. Kepala BNPP E. Ketua DKPP

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/BPN, Kepala BNPP, dan Ketua DKPP, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026, hari Senin, 15 September 2025, dibuka pukul 10.25 WIB oleh

Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/BPN, Kepala BNPP, dan Ketua DKPP, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026, yaitu:

1. Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2026 sebesar **Rp7.800.000.000.000,- (tujuh trilyun delapan ratus miliar rupiah)**, termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tahun 2026 sebesar **Rp105.160.634.000,- (seratus lima miliar seratus enam puluh rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2026.
2. Pagu Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Tahun 2026 sebesar **Rp9.499.346.965.000,- (sembilan trilyun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam rupiah)**.
3. Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2026 sebesar **Rp258.110.875.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus sepuluh ratus delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)**.
4. Tambahan anggaran BNPP sebesar **Rp211.500.000.000,- (dua ratus sebelas miliar lima ratus rupiah)**.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/BPN, Kepala BNPP, dan Ketua DKPP, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026, yaitu:

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2026 sebesar **Rp7.800.000.000.000,- (tujuh trilyun delapan ratus miliar rupiah)**, termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tahun 2026 sebesar **Rp105.160.634.000,- (seratus lima miliar rupiah)**.

seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2026, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp4.577.204.468.000,- (empat trilyun lima ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).**
 - b. Program Tata Kelola Kependudukan sebesar **Rp2.063.244.710.000,- (dua trilyun enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).**
 - c. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar **Rp852.731.523.000,- (delapan ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).**
 - d. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar **Rp306.819.299.000,- (tiga ratus enam milyar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).**
2. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Tahun 2026 sebesar **Rp9.499.346.965.000,- (sembilan trilyun empat ratus sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah),** untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2026, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
- a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp7.015.277.576.000,- (tujuh trilyun lima belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**
 - b. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan sebesar **Rp2.105.945.278.000,- (dua trilyun seratus lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);**
 - c. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar **Rp378.124.111.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar seratus dua puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah).**
3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2026 sebesar **Rp258.110.875.000,- (dua ratus lima puluh delapan milyar seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),** untuk

ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2026, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp222.849.867.000,-** (*dua ratus dua puluh dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
 - b. Program Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar **Rp35.261.008.000,-** (*tiga puluh lima milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ribu rupiah*).
4. Komisi II DPR RI menyetujui tambahan anggaran BNPP sebesar **Rp211.500.000.000,-** (*dua ratus sebelas milyar lima ratus juta rupiah*), sesuai surat Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor B/13703/AG.05.02/09/2025 tanggal 11 September 2025 untuk ditambahkan kedalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) BNPP tahun 2026.
5. Komisi II DPR RI meminta kepada seluruh mitra kerja untuk memperhatikan dengan seksama pandangan, saran dan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI terkait implementasi anggaran tahun 2026.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.16 WIB.

JAKARTA, 15 SEPTEMBER 2025
KETUA RAPAT

TTD

Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H.
A-416